

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Pangerang Moenta, 2016, *Permusyawaratan dan DPRD : analisis aspek hukum dan produk permusyawaratan*, Intelegensia, Malang
- Abdul Aziz Hakim, 2006, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, Yogyakarta.
- Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas*, Makassar,
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2016, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Jimly Asshidiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Laporan Tahunan 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi., Jakarta, 2006.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjadara University Press. Yogyakarta.

## **Jurnal**

Ariani Arifin, dkk, "Penguatan Dan Pengelolaan Kelembagaan Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *UNTAG Law Review* Volume 4, Issue 2, November 2020, PP 1 – 13

Hartanto, Ivan Budi, Achmad Ruslan, and HM Djafar Saidi. "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Bidang Anggaran".

Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019.

Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No.5, 2010.

## **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

## **Internet**

*Anti Corruption Clearing House*, 2018, *Pencocokan Data LHKPN dengan SPT Tahunan*, <http://acch.kpk.go.id/id/artikel/klinik-kpk/918-pencocokan-data-LHKPN-dengan-spt-tahunan>, diakses pada 10 September 2022.